

Nama Rumpun Ilmu: Sosial Humaniora.

**USULAN
PENELITIAN KEMITRAAN**



**HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DALAM HUKUM INTERNASIONAL:
STUDI KASUS PEMISAHAN DIRI CATALONIA DARI SPANYOL**

TIM PENGUSUL

Yordan Gunawan, S.H., Int. MBA, M.H. NIK. 1982020300904 153 054

Hanna Nur Afifah Yogar NIM 20140610472

Denandro Yusuf NIM 20160610380

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Desember 2018

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN KEMITRAAN**

Judul Penelitian : Hak Menentukan Nasib Sendiri Dalam Hukum Internasional: Studi Kasus Pemisahan Diri Catalonia dari Spanyol

Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Peneliti:

a. Nama Lengkap : Yordan Gunawan, S.H., Int. MBA, M.H.

b. NIDN/NIK : 1982020300904 153 054

c. Jabatan Fungsional : -

d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. Nomor HP : +62 853-2809-6673

f. Alamat surel (e-mail) : yordangunawan@umy.ac.id

Anggota Peneliti Mitra 1

a. Nama Lengkap : Hanna Nur Afifah Yogar

b. NIM : 20140610472

c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Peneliti Mitra 2

a. Nama Lengkap : Denandro Yusuf

b. NIM : 20160610380

c. Program Studi : Ilmu Hukum

Biaya Penelitian :

- diusulkan ke UMY : Rp. 14.973.000,00

- dana internal Prodi : -

- dana institusi lain : -

- *inkind* Rp 500.000,00

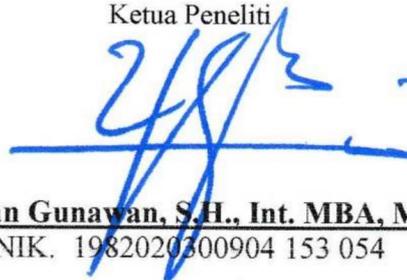
Yogyakarta, 10 Desember 2018

Mengetahui,
Kaprosdi Ilmu Hukum



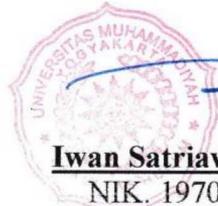
Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.
NIK. 19681023199303 153 015

Ketua Peneliti



Yordan Gunawan, S.H., Int. MBA, M.H.
NIK. 1982020300904 153 054

Menyetujui,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D
NIK. 19700706199904 153 039

1. Judul Penelitian: Hak Menentukan Nasib Sendiri Dalam Hukum Internasional: Studi Kasus Pemisahan Diri Catalonia dari Spanyol

Tahun Usulan	2018/2019
Tahun Pelaksanaan	2019
Durasi Kegiatan	1 (satu) tahun
Usulan Tahun ke-	Ke-1 (satu)
Rumpun Ilmu/Sub Rumpun Ilmu	Ilmu Hukum
Jumlah Tim	3 (tiga) orang
Usulan dana	Rp. 14.973.000,00
Luaran Wajib	Publikasi artikel di Jurnal terakreditasi
Luaran Tambahan	Pengayaan bahan ajar dan tugas akhir mahasiswa

RINGKASAN

Gejolak konflik yang terjadi antara Pemerintahan Spanyol dan Catalonia sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1970. Namun hal ini diperparah saat rencana referendum yang diagendakan oleh Catalonia pada akhir tahun 2017 lalu. Seperti yang diumumkan oleh Presiden Pemerintah Catalonia, Carles Puigdemont, Catalonia akan mengadakan referendum kemerdekaannya pada 1 Oktober 2017. Masalah ini meningkat karena perlawanan warga Catalonia yang berjuang memecah kekuatan terpusat yang dilakukan oleh Pemerintah Spanyol terhadap perekonomian Catalonia.

Dari hal tersebutlah, Catalonia berkeinginan untuk memiliki pemerintahan yang mandiri dan terpisah dari Pemerintah Spanyol. Latar belakang lain untuk mengkonfirmasi hal ini adalah karena Catalonia dapat dengan mudah memenuhi kriteria objektif dan klasik untuk dapat dikatakan sebagai negara, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Tugas Negara dan mampu membangun negara mereka sendiri.

Selain itu, berdasarkan prinsip persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri (*Self-Determination*) yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua orang memiliki hak untuk bebas menentukan, tanpa campur tangan eksternal, urusan politik mereka dan untuk membentuk pemerintah mereka, ekonomi, pembangunan sosial dan budaya, dan setiap Negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak ini sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun di sisi lain, ada kriteria negatif mengenai masalah ini yang mana status kenegaraan tidak boleh tercemar oleh pelanggaran *jus cogens*, itu sejalan seperti yang dinyatakan oleh Pendapat Mahkamah Internasional pada kasus Kosovo (*ICJ Kosovo Advisory Opinion*).

Ditambah lagi, prasyarat hak menentukan nasib sendiri harus dipenuhi untuk menjadikan hak ini valid. Terdiri dari 5 bab, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan membuktikan validitas Catalonia dalam hal mendirikan negara dan pemerintahan yang mandiri, karena tidak ada persetujuan yang diintegrasikan oleh Pemerintah Spanyol setelah secara bebas menyatakan keinginan mereka untuk melakukannya.

Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis lebih jauh mengenai validitas tindakan Catalonia yang menginginkan pemisahan diri dari Spanyol atas dasar hak untuk menentukan nasib sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya bahan –bahan dalam bidang ilmu hukum internasional, khususnya dalam kajian negara, hak untuk menentukan nasib sendiri dalam hal pembentukan negara dan hak untuk melepaskan diri (*secession*).

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi pustaka untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Konvensi, Perjanjian Internasional, buku-

buku ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya yang valid.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini mencoba untuk membangun atau menghasilkan sebuah teori dari bawah (induktif). Peneliti mengumpulkan data/informasi, kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan kategori dalam upaya menemukan pola atas realita/gejala yang terjadi. Selanjutnya, penelitian yang dihasilkan berbentuk deskriptif analitis. Dengan dilakukannya pengolahan dan analisis dari data yang telah penulis kumpulkan, maka penulis akan menggunakan unsur-unsur dari data tersebut terhadap objek penelitian yang ada, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Luaran yang ditargetkan adalah luaran yang bersifat wajib dan tambahan. Luaran wajib penelitian ini adalah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, sedangkan luaran tambahan penelitian ini adalah sebagai pengayaan bahan ajar dan tugas akhir mahasiswa.

KATA KUNCI

Catalonia, Hak Melepaskan Diri, Hak Menentukan Nasib Sendiri, Hukum Internasional.

A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 1977, sejak pembentukan kembali demokrasi, Pemerintah Catalonia telah berulang kali membuat tuntutan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Perlawanan yang dilancarkan oleh Catalonia terhadap pemerintah Spanyol semakin parah dan berlangsung selama bertahun-tahun dan mencapai puncaknya pada tahun 2010 dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada Statuta Otonomi yang direvisi tahun 2006.

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu akan bergerak menuju aspek-aspek dan proses negosiasi Catalonia-Spanyol yang sudah dilalui maupun yang sedang diusahakan serta sudah melewati jalan berliku menuju referendum yang diagendakan oleh Catalonia. Selanjutnya, peneliti akan memetakan preferensi teritoris partai politik Catalonia yang akan memudahkan pemahaman tentang proses negosiasi yang telah terjadi antara pemerintah Spanyol dan Catalonia sejak tahun 1980.¹

Sebagai salah satu wilayah paling makmur di Spanyol dan dikuatkan oleh budaya khas serta bahasa, Catalonia memiliki kecenderungan untuk memiliki kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan rakyatnya, karena upaya Cataloni untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar. Selain itu, kekuasaan ekonomi terpusat yang dilakukan oleh Pemerintah Spanyol menjadikan Catalonia memaksa untuk bebas

¹ Nicolas Levrat et al. 2017, *A Report by A Commission of International Experts: Catalonia's Legitimate Right to Decide, Paths to Self-Determination*. P. 14.